

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH, SISTEM
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, PENGENDALIAN
AKUNTANSI DAN KETAATAN PERATURAN PADA
PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
(Studi Empiris OPD Kabupaten Indragiri Hilir)**

Siti Aisyah¹, Restu Agusti², Vera OKtari²

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Email:Sitiaisyahicha4@gmail.com

*The Influence Of Government Applicant Cometency, Local Government
Accounting System, Accounting Control And Regulatory Compliance
With Regulations On Accountability On The Performance Of
Government Institutions
(Emperical Study OPD Indragiri Hillir Regency)*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of government apparatus competence, local government accounting system, accounting controls and regulatory compliance on the performance accountability of government agencies. The data used in this study are primary data, namely questionnaires. The population in this study were employees who worked at OPD Indragiri Hilir Regency, amounting to 27 OPD. This study used purposive sampling. The umber of samples in this study were 81 respondents, from each OPD 3 respondents would be taken with the criteria of working in the planning sector, civil servants (PNS), working for more on the year. Hypothesis testing was carried out using data quality tests, clasiccal assumption tests, and coefficient tests determinant to find out whetherthe independent variable has an effect or not on the dependent variable. This test was performend using SPSS 20.0 for windows and Microsoft Excel 2010. The results of this study indicate that: (1) the competence of government officials affects the performance accountability of government agencies with a regression coefficient of 0.003; (2) the local government accounting system affects the accountability of the performance of government agencies with a coefficient regression of 0.037; (3) accounting control affects the performance accountability of government agencies with a regression coefficient of 0.001; (4) compliance with regulations affects the performance accountability of government agencies with a regression coeefiebt of 0.020.

Keywords: *Government Applicant Competency, Local Government Accounting System, Accounting Control And Regulatory Compliance With Regulations On Accountability On The Performace Of Government Institutions.*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan pertanggung jawaban atas lembaga-lembaga publik baik pusat maupun daerah, tuntutan akuntabel tersebut merupakan perbaikan akuntabilitas kinerja yang berdampak pada upaya terciptanya good governance. Akuntabilitas diharapkan mampu meningkatkan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah yang merupakan bagian aspek penting dalam kebijakan otonomi daerah serta mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintah yang demokratis. Menurut Widodo (2011), akuntabilitas diartikan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sebelumnya kurang baik dan korup menuju satuan tatanan pemerintah yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas apa hal yang direncanakan dan diselenggarakan oleh pemerintah dalam melayani publik. Dipihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. BPKP (2007)

melihat bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas di instansi pemerintah harus memegang teguh tiga prinsip yaitu: (1) adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; (2) berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin pengguna sumber-sumber daya secara konsisten dengan perundang-undangan yang berlaku; (3) menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 mendapatkan nilai CC cukup (Memadai) bahwa akuntabilitas Kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar (PERMENPAN No 12 Tahun 2015). Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari penjelasan diatas dapat diartikan hasil sistem evaluasi nasional terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) yang disampaikan oleh MENPAN bahwa tingkat kepatuhan dan ketaatan instansi pemerintah daerah secara nasional masih rendah dalam membuat SAKIP, salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya kompetensi SDM. Dengan kompetensi yang baik dimiliki oleh pegawai instansi pemerintah dalam hal penyusunan SAKIP, maka akan dihasilkan SAKIP yang handal dan sesuai aturan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penelitian ini antarlain yaitu Kompetensi Aparatur Pemerintah. Kompetensi aparatur pemerintah termasuk elemen penting dalam terciptanya akuntabilitas kinerja yang baik. Standar Kompetensi adalah spesifikasi atau sesuatu yang di bakukan atau di tetapkan, memuat persyaratan minimal yang harus di miliki seseorang yang akan melakukan pekerjaan tertentu agar orang yang bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik (Moeheriono, 2012). Kompetensi mempengaruhi langsung tingkat kinerja organisasi dari keseluruhan kompetensi individu pada hakikatnya dibentuk oleh keahlian, yaitu hal-hal yang bersifat intelektual dan fisik. Kompetensi individu, sperti keterampilan manajemen dalam semua organisasi merupakan faktor yang mutlak harus di miliki aparatur, hal ini merupakan syarat majunya sebuah organisasi. Dengan memiliki aparatur yang memiliki kompetensi yang tinggi akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.(Robbins,2012).

Selain kompetensi aparatur pemerintah, faktor lain yang memepengaruhi akuntabilitas inerja instansi pemerintah adalah Menurut kepremendagri No.12 Tahun 2016, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat di lakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi perusahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat di terimanya kasdan mengakui belanja atau biaya pada saat di keluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja terbatas, karena inovasi yang di hasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Dengan demikian informasi akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah perubahan *single entry* menjadi *double entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alas an utama dari kemudahan dan kepastian siring dengan tingginya tuntutan perwujudan *good public governance*, perubahan tersebut di pandang sebagai solusi yang mendesak untuk di tetapkan karena pengaplikasian *double entry* dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable (Mardiasno,2009)

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penelitian ini adalah Pengendalian Akuntansi. Salah satu jenis dari pengendalian interen adalah pengendalian akuntansi pada sector pemerintahan dengan di lakukannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah maka lapoan keuangan pemerintah dalam hal ini APBN/APBD telah menggunakan pengendalian akuntansi. pengendalian atau control akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk menggunakan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan standar keuangan (*hery, 2009*). Pengendalian dan laporan akuntansi mengenai peran merupakan bagia dari suatu rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efesiensi dan mendapatkan penyimpanan atau trands yang tidak memuaskan.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penelitian ini adalah Ketaatan Peraturan Pada Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang di bentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang meningkat. Tujuan undang-undang dan peraturan Negara adalah untuk mengatur dan menrtibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang dan peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib (*Soleman, 2007*) ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam mentaati peraturan yang telah di bentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang

berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat dalam mengukur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) ? 2) Apakah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)? 3) Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)? 4) Apakah Ketaatan Peraturan Pada Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) ?

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AKIP

Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai “pertanggungjawaban” akuntabilitas publik merupakan hasil dari suatu entitas kedalam bentuk fungsinya, program dan kegiatan, maupun kebijakan suatu lembaga publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (*publik disclosure*) dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimaksud tanpa hambatan. Akuntabilitas merupakan konsep pertanggungjawaban atas tindakan individual atau organisasi yang telah diamatkan. Haryanto (2008:16) menyatakan bahwa akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Kompetensi Aparatur Pemerintah

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 menyatakan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan kompetensi merupakan bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat dipredeksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan predeksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria yang digunakan (*Nadler dalam samsidin 2011*) sebagai orang yang pertama kali menentukan istilah *Human Resource Development* (HRD) tahun 1969, membedakan antara pengertian Traizino, Education, dan Development sebagai berikut: "Training Learning to present job. Education Learning to prepare the individual for a different but idrnsified job. Defoment learning for growth of the individual but not relased so a specific present of fuse job." Kompetensi aparatur pemerintah memungkinkan untuk tercapainya suatu akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang efektif sesuai dalam prinsip kedua yaitu berdasarkan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ini berarti sumber daya yang

di gunakan harus konsisten dan berkopenten dibidangnya dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah umum, pembangunan, dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik apabila adanya dukungan pengelola sumber daya manusia, peralatan/sarana dan prasarana serta biaya atau anggaran serta dukungan tugas-tugas umum lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah sehingga terwujud pertanggungjawabaan yang memadai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kompetensi individu pada hakikatnya dibentuk pada keahlian, yaitu hal-hal yang bersifat intelektual dan fisik kompetensi individu seperti keterampilan manajemen dalam semua organisasi merupakan faktor yang mutlak harus dimiliki aparatur

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Dalam Kepmendari No 13 Tahun 2016, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut *Muhammad Gada (2000:105)* sistem akuntansi pemerintah adalah sistem akutansi yang mengelola semua transaksi keuangan, aset, kewajiban dan ekuitas yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang

tepat waktu dan mutu yang dapat di andalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar eksekutif, maupun berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.

Pengendalian Akuntansi

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Salah satu jenis dari sistem pengendalian interen adalah Pengendalian Akuntansi. Pada sektor pemerintah, dengan dikeluarkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah maka laporan keuangan pemerintah dalam hal ini APBN /APBD telah menggunakan pengendalian Akuntansi. Pengendalian atau control akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk pengamanan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan. Pengendalian dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan penyimpangan atau trends yang tidak memuaskan.

Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang bentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai

kekuatan yang mengikat. Tujuan undang-undang dan peraturan Negara adalah untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. (Soleman,2007). Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengukur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis Penelitian

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kompetensi aparatur pemerintah memungkinkan untuk tercapainya suatu akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang efektif sesuai dalam prinsip kedua yaitu berdasarkan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ini berarti sumber daya yang di gunakan harus konsisten dan berkopenten dibidangnya dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah umum, pembangunan, dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik apabila adanya dukungan pengelola sumber daya manusia, peralatan/sarana dan prasarana serta biaya atau anggaran serta dukungan tugas-tugas umum lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

kelembagaan pemerintah daerah sehingga terwujud pertanggungjawaban yang memadai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan memiliki aparatur yang mempunyai kompetensi yang tinggi akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Martin (2018) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H1 : Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Apabila sistem akuntansi pemerintah daerah dilakukan secara efektif dan koefisien dalam menyajikan laporan keuangan, maka pertanggungjawaban atas laporan keuangan akan menjadi lebih baik sesuai yang telah ditentukan, secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam rangka mencari dan mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam rangka mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Eddy Supriadi (2007). Semakin baik penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga akan semakin baik.

wistiasari (2016) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H2 : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan (Hery, 2009), pengendalian (*control*) mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan. Melalui pengendalian akuntansi yang baik, akan tersusun pelaksanaan kinerja keuangan dengan baik sehingga memudahkan proses-proses pengambilan keputusan. Adam Satriadi (2019) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H3 : Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Ketaatan Peraturan Pada Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau

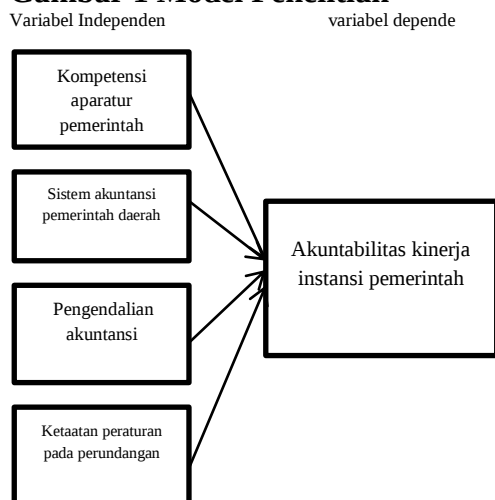
pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Tujuan undang-undang dan peraturan Negara adalah untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. (Soleman,2007). Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengukur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Asnita (2017) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa ketaatan peraturan pada perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H4 : Ketaatan Peraturan Pada Perundangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Model Penelitian

Berikut ini adalah model penelitian dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:

Gambar 1 Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja di pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistic. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20.0 *for windows* dan Microsoft excel 2010 dan data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner dengan kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS), bekerja dibidan perencanaan dan bekerja diatas satu tahun di OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Defenisi Opraionel Variabel

AKIP Dalam PP No. 29 Tahun 2004 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodic

Standar kompetensi adalah spesifikasi atau sesuatu yang digunakan, memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki seseorang yang akan melakukan pelajaran tertentu agar orang yang bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik (Angraini:2013).

Menurut Muhammad Gede (2000:105), sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sistem akuntansi yang mengola semua

transaksi keuangan, aset, kewajiban dan ekuitas yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dan mutu yang dapat diandalkan, baik badan-badan yang diperlukan diluar eksekutif, maupun berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.

Pengendalian akuntansi (accounting control) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk pengamanan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan catatan keandalan keuangan (Hery, 2009). penggunaan struktur akuntansi memungkinkan diadakannya pengendalian biaya dan perbandingan biaya-biaya tersebut dengan rencana tindakan yang ditetapkan sebelumnya. Melalui pengukuran prestasi kerja (performance) dengan pengumuman catatan dan laporan-laporan akuntansi dan statistik, manajemen dapat memberikan petunjuk yang sesuai dan mengarahkan kegiatan perusahaan.

Peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang meningkat. tujuan undang-undang dan peraturan Negara adalah untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib (Soleman, 2007). Ketaatan pada peraturan perundangan adalah peraturan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan

menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Metode Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Statistic deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau keahlian suatu instrument, sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya.

Uji Realibilitas

Uji realibilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Uji Normalitas

Normalitas data merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam analisis multivariate. Jika variasi yang dihasilkan dari distribusi data yang tidak normal, maka tes statistik yang dihasilkan tidak valid

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (Variance Inflation Tolerance). Jika $VIF > 10$ dengan nilai Tolerance $< 0,10$ maka terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika grafik plot menunjukkan suatu plot titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda dilakukan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan data terbebas dari asumsi-asumsi. Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Setiap OPD diberi 3 kuesioner, keseluruhan kuesioner yang dibagikan adalah sebanyak 81 kuesioner. Dari kuesioner yang

disebar kuesioner yang tidak kembali 0% perhitungan tingkat pengambilan kuesioner dapat dilihat pada table 1 berikut ini.

Table 1 Distribusi Sebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jumlah kuesioner yang disebar	81	100%
Jumlah kuesioner yang kembali	81	100%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	-	-
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	81	100%

Sumber: data primer, 2020

Uji Kualitas Data

Uji Reabilitas

Hasil uji reliabilitas dengan bantuan SPSS akan menghasilkan *conbrach Alpha*. Suatu instrument dapat dikatakan reliabel apabila memiliki *conbrach alpha* > 0.60 . Hasil uji reliabilitas dapat dilihat dari tabel 4.

Tabel 2 Hasil Uji Reliability

Items	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,749
Kompetensi Aparatur Pemerintah	0,773
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0.807
Pengendalian Akuntansi	0,803
Ketaatan Peraturan Pada Perundangan	0,821

Sumber: Data Output SPSS 20, 2020

Uji Validitas

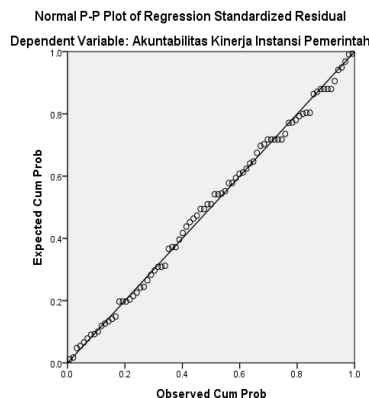
Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05.

Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal p-p plot terlihat titik-titik menyebar disekitar

garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arag garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas. Didalam penelitian ini disajikan dalam grafik p-plot.

Gambar 2 Normal PP Plot



Sumber : Data Output SPSS

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu kondisi hubungan linier antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya dalam model regresi. Salah satu cara untuk menguji adanya Multikolinieritas dapat dilihat Variance Inflation Factor (VIF), jika nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kompetensi Aparatur pemerintah	0.921	1.086
	Sistem Akuntansi pemerintah Daerah	0.714	1.401
	Pengendalian Akuntansi	0.585	1.709
	Ketaatan Peraturan pada Perundangan	0.615	1.627
4.1.1.1 a. Depende Hasil Uji Multikolinieritas 92			
4.1.1.2 Hasil Uji Multikolinieritas 92			
nt Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			

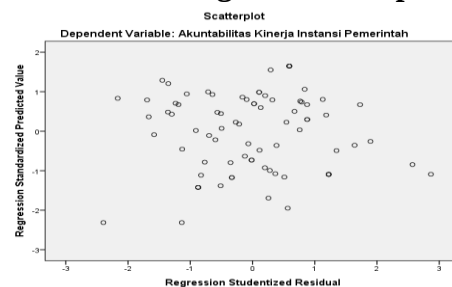
Sumber : Data Output SPSS 2020

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (diagram scatterplot). Jika:

1. jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu poto tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
2. jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka titik terejadi heteroskedastisitas.

Gambar 3 Diagram Scatterplot



Sumber: Data Output SPSS 2020

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

1. Nilai konstanta = 9.916 menunjukkan bahwa jika variabel (X) bernilai 0 (nol) maka (Y) bernilai sebesar 9.916.
2. Nilai koefisien regresi variabel (X1) adalah 0,268 dan bertanda positif . Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X1) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 0,268.
3. Nilai koefisien regresi variabel (X2) adalah .414 dan bertanda positif . Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X2) dengan asumsi variabel lainnya tetap,

maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 0.414.

4. Nilai koefisien regresi variabel (X3) adalah 0.719 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X3) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 0.719.
5. Nilai koefisien regresi variabel (X4) adalah 0.531 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X4) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 0.531.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian persial (Uji t)

1. Nilai signifikansi kompetensi aparatur pemerintah sebesar $0,003 < 0,05$ dengan t hitung sebesar $3,061 > t$ tabel 1,99167. Dengan demikian hipotesis 1 yang dirumuskan diterima dengan hasil kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Nilai signifikansi sistem akuntansi pemerintah daerah sebesar $0,037 < 0,05$ dengan t hitung sebesar $2,214 > t$ tabel 1,99167. Dengan demikian hipotesis 2 yang dirumuskan diterima dengan hasil sistem akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Nilai signifikansi pengendalian internal sebesar $0,001 < 0,05$ dengan t hitung sebesar $3,539 > t$ tabel 1,99167. Dengan demikian

hipotesis 3 yang dirumuskan diterima dengan hasil pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Nilai signifikansi ketaatan pada peraturan perundangan sebesar $0,020 < 0,05$ dengan t hitung sebesar $2,385 > t$ tabel 1,99167. Dengan demikian hipotesis 4 yang dirumuskan diterima dengan hasil ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Hipotesis Pertama

Dari hasil pengujian statistik hipotesis pertama hasil uji statistik t pada variabel kompetensi aparatur pemerintah dalam penelitian ini memiliki β sebesar 0.268 dinyatakan dengan tanda positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0.003 yang berada dibawah atau lebih kecil dari nilai $\alpha = 0.05$ yang artinya menerima hipotesis. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Uji Hipotesis Kedua

Dari hasil pengujian statistik hipotesis pertama hasil uji statistik t pada variabel sistem akuntansi pemerintah daerah dalam penelitian ini memiliki β sebesar 0.414 dinyatakan dengan tanda positif dengan tingkat signifikansi sebesar

0.037 yang berada dibawah atau lebih kecil dari nilai $\alpha = 0.05$ yang artinya menerima hipotesis. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima bahwa sistem akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Dari hasil pengujian statistik hipotesis pertama hasil uji statistik t pada variabel pengendalian akuntansi dalam penelitian ini memiliki β sebesar 0.719 dinyatakan dengan tanda positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0.001 yang berada dibawah atau lebih kecil dari nilai $\alpha = 0.05$ yang artinya menerima hipotesis. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Uji Hipotesis Keempat

Dari hasil pengujian statistik hipotesis pertama hasil uji statistik t pada variabel ketaatan peraturan pada perundangan dalam penelitian ini memiliki β sebesar 0.531 dinyatakan dengan tanda positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0.020 yang berada dibawah atau lebih kecil dari nilai $\alpha = 0.05$ yang artinya menerima hipotesis. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini diterima bahwa ketaatan peraturan pada perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data mengenai analisis secara keseluruhan penelitian ini menguji akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dipengaruhi kompetensi aparatur pemerintah, sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian akuntansi dan ketaatan peraturan pada perundangan. Dari hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan SPSS disimpulkan bahwa :

1. Dari hasil pengujian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin berkompeten aparatur yang dimiliki maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Dari hasil pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin baik sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Dari hasil pengujian hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin baik pengendalian yang dilakukan terhadap bagian akuntansi maka

akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Dari hasil pengujian hipotesis keempat dapat disimpulkan bahwa ketaatan peraturan pada perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin baik bentuk ketaatan terhadap perundangan yang berlaku maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat berpengaruh pada hasil penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data dengan menggunakan survei melalui kuesioner sehingga jawaban responden hanya terpaku pada pertanyaan yang ada pada kuesioner saja.
2. Variabel yang diukur menggunakan kuesioner hanya menggambarkan pendapat dari aparat pemerintahan desa Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga hasil ini masih belum sepenuhnya diyakini dapat digeneralisasikan untuk semua aparatur instansi pemerintah.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yang memberikan pengaruh hubungan langsung, sehingga masih dapat melakukan mediasi atau moderasi terhadap variabel lainnya.

Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan penelitian dan keterbatasan dalam penelitian diatas,

penulis memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Penggunaan selain metode survey atau kuesioner seperti metode interview dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan subjek dan mendapatkan kejujuran jawaban subyek.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dan lokasi yang berbeda agar hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu diharapkan juga penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih besar sehingga dapat memberikan hasil dan gambaran penelitian yang lebih baik dan dapat digeneralisasi.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan melakukan mediasi atau moderasi dengan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adam satriadi Arshi 2019 “ pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” dikabupaten lima puluh kota provinsi Sumatra Barat. Skripsi Universitas Riau

Asnita Simpur 2017 “ penagruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan sistem

pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” dikabupaten siak. Skripsi Universitas Riau.

Hery. 2009. Teori akuntansi. Jakarta Kencana

pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” jurnal E-JRA Vol. 07 NO. 02

Soleman, Rosman. 2007 “ pengaruh kompetensi, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Disertai. Unpad.

Wistiasari Esy 2016 “pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah, dan sistem pelaporean terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” dikabupaten kuantan singing. Skripsi Universitas Riau.